

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Ada beberapa hal yang melatarbelakangi penelitian ini. Pertama, ada banyak kasus konflik antara perusahaan –terutama perusahaan yang mengambil sumber daya alam- dengan komunitas atau masyarakat sekitar perusahaan beroperasi. Kedua, ada kecenderungan program tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR) dimanfaatkan untuk meredam atau mengatasi konflik itu. Ketiga, melalui UUPT No 40/2007, pemerintah mewajibkan perusahaan menganggarkan dan melaksanakan program CSR. Keempat, ada kebutuhan piranti atau pendekatan yang sistematis melihat program CSR dengan tujuan meningkatkan manfaatnya untuk komunitas.

Tidak bisa dipungkiri semua kegiatan perusahaan, terutama kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang ekstraktif, akan memberikan dampak lingkungan pada lingkungan dan dampak sosial pada kehidupan manusia. Dampak pada lingkungan yang membuat kualitas lingkungan menurun atau rusak, misalnya pembukaan hutan untuk perkebunan, penebangan hutan untuk diambil kayunya, penambangan, akhirnya akan menimbulkan persoalan sosial antara lain konflik antara perusahaan dengan masyarakat, kemiskinan, pengusuran masyarakat dari wilayah adat atau hutan adat.

Beberapa contoh kasus antara lain kasus lumpur panas PT Lapindo Brantas^{1 2}, kasus PT Newmont Minahasa Raya³ (Hills dan Welford, 2005),

¹ Berita dan informasi terkini mengenai lumpur panas di Sidoarjo bisa dibaca setiap hari di berbagai media massa. Informasi ini diambil dari situs yang dikelola oleh ahli geologi di <http://hotmudflow.wordpress.com/>

² Presiden memimpin rapat kabinet terbatas khusus membahas lumpur panas Sidoarjo tanggal 4 April 2007. Rapat memutuskan Lapindo Brantas wajib membayar ganti rugi tunai untuk semua warga yang rumahnya terendam lumpur panas. Informasi bisa dibaca di berbagai surat kabar nasional, di antaranya Harian Kompas tanggal 5 April 2007 menulis berita dengan judul “Lapindo Wajib Bayar Tunai” di halaman 15.

³ Tanggal 8-13 Agustus 2005, saya berada di Manado, Buyat, dan Duminanga untuk bertemu dengan Dr Rignolda Djamaludin, Direktur Kelola yang mendampingi warga Buyat Pante yang

konflik PT Freeport Indonesia dengan masyarakat lokal,^{4 5} konflik masyarakat adat Dayak Benuaq dengan PT London Sumatera International di Desa Muara Nayan, Kaltim (Basyar, 1999), kasus PT Inti Indorayon Utama atau sekarang PT Toba Pulp Lestari Tbk (Anto, 2001).

Bersamaan dengan tumbuhnya kesadaran lingkungan dan menguatnya posisi masyarakat di negara yang lebih demokratis, perusahaan dituntut bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkannya. Perusahaan bukan lagi semaksimal mungkin mencari keuntungan tetapi perusahaan memiliki tanggung jawab sosial pada masyarakat. Muncul istilah *corporate citizenship* (Jones, et. al., 2007)

Istilah *corporate social responsibility* (CSR) sering dipertukarkan dengan *corporate responsibility* (CR) atau dengan *corporate citizenship* (CC) meskipun ada perbedaan. Secara umum ketiga istilah itu bermakna perusahaan di mana pun beroperasi dan mencari keuntungan tidak bisa lepas dari masyarakat. Perusahaan tidak hanya bertanggung jawab pada pemilik modal, pemasok, maupun pelanggannya. Perusahaan bertanggung jawab juga pada komunitas di lokasi atau tapak kegiatan perusahaan dan komunitas dalam arti luas yaitu masyarakat.

Di Indonesia istilah yang paling sering dipakai dan umum adalah *corporate social responsibility* (CSR). Apa pun definisi ketiga istilah itu, ada satu yang sama yaitu ketiganya dijabarkan menjadi program atau proyek untuk masyarakat atau komunitas tertentu.

Di Indonesia perusahaan wajib menganggarkan dan menjalankan program CSR. Tanggal 16 Agustus 2007, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono mensahkan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang sempat diperdebatkan oleh para pengusaha. UUPT No 40/2007 itu

memutuskan pindah ke Duminanga, dengan warga Buyat Pante yang memutuskan tinggal, dan dengan mereka yang pindah ke Duminanga

⁴ Lihat Gatra Online di <http://www.gatra.com/2006-03-03/artikel.php?id=92712>, diakses tanggal 5 April 2007

⁵ Lihat berita The Jakarta Post "Hundred of Papuans demand employment in Timika," <<http://www.thejakartapost.com/Archives/ArchivesDet2.asp?FileID=20070321.G04>>, diakses 5 April 2007

mewajibkan perusahaan (perseroan) melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Perusahaan (perseroan terbatas) wajib menganggarkan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jika perusahaan tidak melaksanakannya akan ada sanksi (Bab V, Pasal 74, UUPT No 40/2007).

Pengaturan ini "...bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksud untuk mendukung terjalannya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat..." (Penjelasan UU No 40/2007). Kata kuncinya: pembangunan ekonomi berkelanjutan, kualitas hidup dan lingkungan, komunitas setempat, dan masyarakat umumnya.

Dari hasil studi mengenai praktik CSR lima perusahaan multi-nasional yang ekstraktif, Walhi menyimpulkan konsep CSR dan praktiknya tidak memberikan kontribusi untuk menegakkan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat yang hidup dan tinggal di sekitar perusahaan yang mengeksploitasi sumber daya alam. Pemerintah mengambil tanggung jawab lebih sedikit untuk memenuhi hak ekonomi, sosial budaya masyarakat, dan menyerahkannya kepada perusahaan (Setiawan dan Ginting, 2008).

Ketika program CSR marak ada upaya mengukur keberhasilan program CSR. Upaya mengukur CSR fokus pada manfaat bagi perusahaan atau perusahaan sebagai pusat atau dari sudut pandang perusahaan (Aupperle et.al., 1985; Korhonen, 2003; Pirsch, et.al., 2007; Jamali, 2008; Panayiotou et.al., 2009; Turker, 2009).

Perusahaan sebagai pusat evaluasi tergambar dari laporan CSR mereka yang memfokuskan laporan pada makna CSR bagi perusahaan, dari sudut pandang atau sisi perusahaan. Misalnya Scottish Power, perusahaan energi di Kerajaan Inggris, memfokuskan laporan CSR mereka tahun 2004 pada lingkungan, pasar, lingkungan kerja, dan komunitas, tetapi isu yang paling signifikan dilaporkan oleh CEO-nya adalah fokus pada makna CSR bagi mereka (Hawkins, 2006), bukan bagi masyarakat atau komunitas.

Perlu pendekatan alternatif untuk melihat program CSR lebih obyektif dari sudut pandang masyarakat, bukan hanya dari sudut pandang perusahaan atau pemerintah.

1.2. Perumusan Masalah

Ada atau tidak ada program CSR, kegiatan perusahaan, terutama perusahaan ekstraktif sumber daya alam, pasti akan memberikan dampak pada komunitas di sekitarnya. Sebuah perusahaan ekstraktif akan memberikan dampak ekonomi (positif maupun negatif), dampak sosial (terjadi perubahan sosial positif maupun negatif), budaya (misalnya terjadi pemerosotan budaya atau muncul budaya baru), dan politik.

Selama ini jarang evaluasi dampak (positif maupun negatif) beroperasinya sebuah perusahaan pada komunitas di sekitarnya secara sistematis dilaksanakan pada awal-awal beroperasi. Biasanya setelah muncul konflik antara perusahaan dan komunitas barulah diteliti aspek sosial, ekonomi, politik, budaya, yang terutama untuk meredam atau mengatasi konflik itu.

Demikian juga program CSR baru dimulai setelah ada konflik. Program CSR coba difungsikan sebagai upaya meredam atau mengatasi konflik, seperti pemadam kebakaran yang bekerja ketika terjadi kebakaran. Program CSR dinilai berhasil ketika bisa meredam konflik. Penilaian seperti ini terpusat pada manfaat program CSR bagi perusahaan (Aupperle et.al., 1985; Korhonen, 2003; Kotler dan Lee, 2005; Pirsch, et.al., 2007; Jamali, 2008; Panayiotou et.al., 2009; Turker, 2009).

Dari luar perusahaan sejumlah institusi juga mencoba “mengevaluasi” program CSR yang “berhasil” dengan ukuran penilaian beragam. Evaluasi dari luar perusahaan ini lebih banyak bertujuan promosi yaitu melalui berbagai jenis penghargaan CSR atau CSR Award.⁶

⁶ Beberapa tahun terakhir muncul banyak penghargaan CSR antara lain penghargaan CSR yang diberikan oleh Departemen Sosial dan Kementerian Koordinator Kesra (CSR Award Indonesia), Indonesia Sustainability Reporting Award yang diberikan oleh National Center for Sustainability Reporting bersama dengan Institut Akuntan Manajemen Indonesia, penghargaan Annual Report Award diberikan oleh tujuh lembaga (Bapepam LK, Bursa Efek Indonesia, Bank Indonesia,

Lagi-lagi penilaian atau evaluasi itu tetap mendapat protes oleh masyarakat. Masyarakat menilai, meskipun satu perusahaan sudah mendapatkan penghargaan CSR, program CSR-nya tidak memberikan manfaat bagi masyarakat yang tinggal di dekat lokasi perusahaan beroperasi (Setiawan dan Ginting, 2008).

Mencermati praktik dan kritis yang dilontarkan pada berbagai program CSR itu, sesungguhnya ada kebutuhan bagi perusahaan, masyarakat, dan pemerintah (sejalan dengan diwajibkannya perusahaan membiayai program CSR) mencari satu pendekatan sistematis untuk membuat program CSR lebih bermanfaat bagi masyarakat dan komunitas dalam format lebih spesifik spasial.

Pendekatan kapital sosial atau *social capital* sepuluh tahun terakhir ini banyak digunakan dan dikaitkan dengan program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (peningkatan ekonomi masyarakat, pengentasan kemiskinan dan berbagai aspek pembangunan masyarakat lainnya). Bank Dunia yang paling getol mengembangkan pemikiran dan pendekatan kapital sosial untuk mengevaluasi program-program pembangunannya di berbagai negara berkembang (Bank Dunia, 1998; Collier, 1998; van Bastelaer, 2000; Sorensen, 2000; Pantoja, 2000; Gugerty dan Kremer, 2000).⁷

Sejumlah peneliti juga mencoba menggaitkan kapital sosial dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Menggunakan pendekatan kapital sosial untuk melihat program CSR lebih obyektif masih baru. Belum banyak penelitian empiris maupun pembahasan teoritis yang mencoba menghubungkan kapital sosial dengan tanggung jawab perusahaan (Sacconi dan Antoni, 2008; Jones, et. al., 2007; Hiß, 2006; Perrini, 2006; Anonim, 2005; Loza dan Ogilvie, 2005; La Porta et. al., 1997).

Kementerian BUMN, Komite Nasional Kebijakan Governance, Ikatan Akuntan Indonesia, Ditjen Pajak), SGS CSR Award yang diberikan oleh PT SGS Indonesia, Indonesia CSR Award yang diberikan oleh Corporate Forum for Community Development, CSR Award Koperasi yang diberikan oleh Dewan Koperasi Indonesia (didukung oleh Kementerian Koperasi dan UKM, PT Surindo Utama).

⁷ Beragam paper dan laporan hasil penelitian terkait dengan kapital sosial yang dikerjakan Bank Dunia bisa di lihat di <<http://go.worldbank.org/VEN7OUW280>> Diakses terakhir tanggal 19 November 2009

Perlu diperbanyak lagi studi yang mengaitkan kapital sosial dengan program-program untuk masyarakat atau komunitas, bukan hanya program CSR. Pendekatan kapital sosial sejauh ini bisa digunakan untuk memberikan masukan perbaikan program CSR dan program pembangunan masyarakat lainnya.

1.3. Tujuan Penelitian

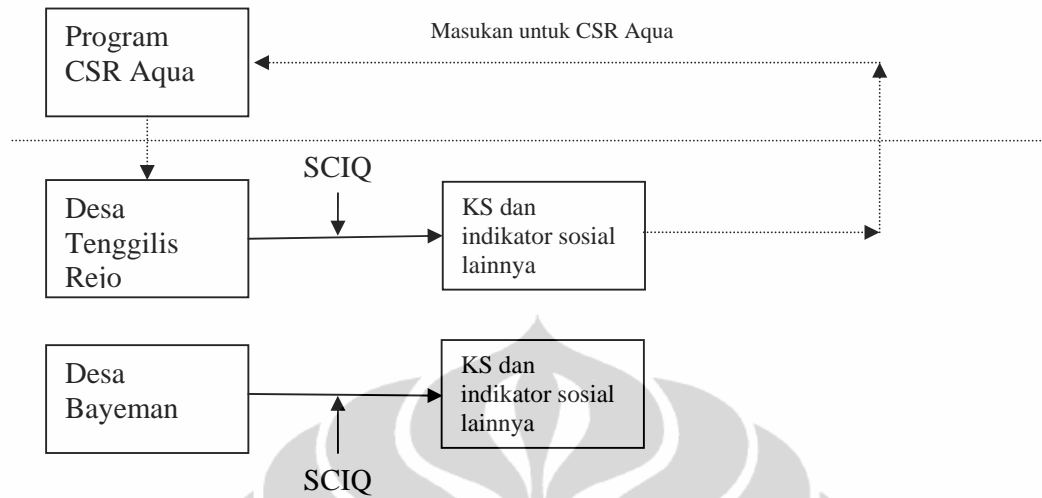
Tujuan penelitian ini adalah mempelajari kapital sosial dan kondisi sosial lainnya dari dua desa yang berdekatan menggunakan Social Capital Integrated Questioner (SCIQ) yang dikembangkan Bank Dunia.

Dua desa itu adalah Desa Tenggilis Rejo dan Desa Bayeman, Kecamatan Gondan Wetan, Kabupaten Pasuruan. Fasilitas produksi PT Tirta Investama (selanjutnya hanya akan disebut pabrik Aqua) berada di Desa Tenggilis Rejo. Pabrik Aqua sudah beroperasi selama hampir lima tahun dan ada program CSR-nya yang sudah berlangsung satu tahun. Desa Bayeman tidak ada perusahaan dan tidak ada program CSR maupun perusahaan lain atau program CSR dari perusahaan lain.

Hasil pembelajaran ini kemudian dijadikan dasar masukan pada program CSR perusahaan (Lihat Gambar 1.1). Penelitian ini tidak bertujuan mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan program CSR PT Tirta Investama.

Pertanyaan penelitian:

1. Bagaimana perbedaan kapital sosial dan indikator sosial antara Desa Tenggilis Rejo dan Desa Bayeman?
2. Apa saja masukan untuk perbaikan program CSR dari hasil pemahaman kapital sosial dan kondisi sosial lainnya, terutama di Desa Tenggilis Rejo?



Gambar 1.1. Diagram Alur Logika Penelitian.

1.4. Manfaat Penelitian

Data yang didapat menggunakan piranti survei SCIQ akan meningkatkan pemahaman kapital sosial dan kondisi sosial lainnya untuk Desa Tenggilis Rejo dan Desa Bayeman. Dari data dan hasil pembahasan hasil survei akan dijadikan dasar masukan untuk perbaikan program CSR Aqua yang baru berjalan setahun ini.

Hasil penelitian ini bisa menjadi acuan untuk penelitian yang sama pada waktu mendatang untuk melihat apakah ada perubahan dibandingkan hasil studi. Penelitian ulang setelah periode tertentu ini bisa mengkonfirmasi apakah dampak beroperasinya perusahaan di desa itu positif atau negatif.

Penelitian ulangan dengan periode tertentu ini bisa digunakan untuk terus-menerus meningkatkan kebijakan pembangunan pemerintah (nasional maupun lokal) dan pengembangan masyarakat oleh perusahaan.